

**TINJAUAN RESOLUSI DK PBB NO. 799 TENTANG  
TINDAKAN ISRAEL ATAS PENGUSIRAN  
WARGA PALESTINA**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**ARIEF JUNIAR HARDIAWAN**

**NRP 2880068**

**NIRM 88.7.004.12061.06036**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1994**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



ARIEF JUNIAR HARDIAWAN

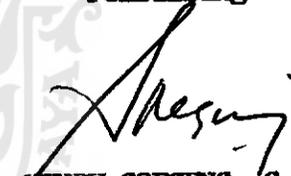
Mengetahui

Dekan

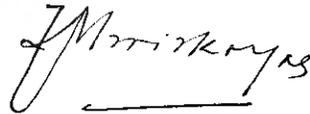


DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.

Pembimbing



HENRY SOEGENG, S.H.



J.M. ATIK KRUSTIYATI, S.H., M.S.

## ABSTRAK

Pemerintah Israel pada tanggal 17 Desember 1992, telah melakukan pengusiran terhadap sejumlah warga Palestina dari daerah pendudukan, Tindakan ini banyak mengundang reaksi dari dunia internasional, dan dunia menganggap hal tersebut adalah sebagai pelanggaran baik terhadap hak azasi manusia maupun norma-norma serta ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama PBB yang mempunyai tujuan dan tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, segera mengambil tindakan dalam upayanya untuk menyelesaikan pertikaian diantara kedua belah pihak tersebut.

Tindakan tersebut berupa suatu keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan berdasarkan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan pasal 39 Piagam PBB. Resolusi tersebut ditujukan kepada Israel yang berisi suatu tuntutan agar Israel segera memulangkan seluruh warga Palestina yang diusirnya dari daerah pendudukan dengan aman dan selamat.

Namun dalam perkembangan lebih lanjut, ternyata keputusan tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dari Israel, yaitu dengan tidak ditaati dan dilaksanakannya resolusi tersebut, sehingga resolusi itu tidak

berjalan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terhadap permasalahan tersebut, maka saya mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan dari resolusi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari teori-teori yang ada, yang dalam hal ini adalah berdasarkan Piagam PBB dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dan berlaku dalam hukum internasional.

Dalam skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan metode pendekatan secara yuridis normatif, karena pembahasan masalah dalam skripsi ini bertolak dari norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang saya kemukakan.

Adapun data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan data sekunder, yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari literatur-literatur, mas media cetak dan bacaan-bacaan lain yang memuat dan membahas tentang keadaan di Timur Tengah khususnya daerah pendudukan Israel yang ada kaitannya dengan masalah yang saya bahas. Selain menggunakan data sekunder, skripsi ini juga menggunakan data primer sebagai penunjang, yaitu melalui wawancara yang saya lakukan pada instansi-instansi dan departemen terkait yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini saya lakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, media cetak, serta pendapat dari para sarjana ahli hukum internasional yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data tersebut kemudian diklasifikasi secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pengolahan data skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu bermula dari data sekunder yang bersifat umum kemudian diterapkan pada permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang telah saya kemukakan, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas. Hal ini didasarkan pada analisa secara kualitatif, yaitu dengan cara berfikir yang nalar dan runtut dengan menelaah sistematika dan konsistensi dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Selanjutnya, penelitian skripsi ini membutuhkan waktu yang dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- a. Fase pengumpulan data : enam minggu
- b. Fase pengolahan data : empat minggu
- c. Fase analisa data : delapan minggu

Sedangkan sebagai pokok hasil penelitian dalam skripsi ini adalah suatu keterbatasan kemampuan dalam tubuh Dewan Keamanan dalam menerapkan setiap keputusan-

nya. Hal ini disebabkan adanya batas kewenangan yang telah diatur dalam Piagam PBB. Selain itu, dengan adanya unsur politis, hal ini dapat mempengaruhi Dewan Keamanan dalam menerapkan setiap keputusannya, bahkan hal tersebut dapat menghambat upayanya untuk menyelesaikan suatu pertikaian yang ada.

Adapun yang dimaksud dengan Resolusi Dewan Keamanan adalah suatu keputusan yang dihasilkan dari suatu rapat atau sidang Dewan Keamanan PBB yang biasanya merupakan suatu keputusan untuk berbuat atau bertindak, dimana keputusan itu diambil berdasarkan pemungutan suara atau voting.

Resolusi Dewan Keamanan ini bersifat mengikat, khususnya bagi negara yang langsung menjadi obyek tujuan dari resolusi tersebut, dan secara umum juga mengikat bagi semua anggota PBB lainnya.

Resolusi Dewan Keamanan ini dikeluarkan dalam hal terjadinya perselisihan atau pertikaian antar negara, dimana pertikaian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Demikian halnya terhadap tindakan Israel tersebut, Maka Dewan Keamanan berwenang dan berkewajiban untuk menangani dan menyelesaikan pertikaian tersebut.

Berdasarkan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya, maka Dewan Keamanan telah mengeluarkan resolusinya

untuk menyelesaikan sengketa antara Israel dan Palestina secara damai, tetapi hal ini tidak mendapat tanggapan yang positif dari Israel. Sehingga pelaksanaan resolusi tersebut tidak dapat berlaku efektif seperti apa yang diharapkan.

Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penerapan dan pelaksanaan Resolusi DK PBB Nomor 799 terhadap Israel tidak dapat berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan adanya batas-batas kemampuan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan dalam menerapkan dan melaksanakan setiap keputusannya.

